

KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEPENTINGAN POLITIK: ANALISIS KETIDAKSTABILAN ARAH PENDIDIKAN DI INDONESIA

Muhammad Rifqi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: muhammadrifqi0799@gmail.com

Abstrak

Pendidikan merupakan sektor strategis dalam pembangunan nasional yang memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas. Namun, dalam praktiknya, kebijakan pendidikan di Indonesia kerap kali mengalami ketidakkonsistenan akibat intervensi politik yang kuat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik dalam kebijakan pendidikan di Indonesia, serta dampaknya terhadap kontinuitas dan mutu sistem pendidikan nasional. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang berfokus pada telaah terhadap berbagai literatur ilmiah, dokumen kebijakan, dan sumber-sumber akademik terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan sering kali berubah mengikuti rezim politik yang berkuasa, ditandai dengan pergantian kurikulum, program, dan arah kebijakan yang tidak selalu selaras dengan kebutuhan jangka panjang dunia pendidikan. Politisasi pendidikan telah menimbulkan ketidakpastian, lemahnya perencanaan strategis, dan berkurangnya independensi institusi Pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang kuat didasarkan pada kajian ilmiah, partisipasi masyarakat, dan prinsip-prinsip keberlanjutan yang bebas dari kepentingan politik praktis.

Abstract

Education is a strategic sector in national development that plays a crucial role in producing quality human resources. However, in practice, education policy in Indonesia often experiences inconsistencies due to strong political intervention. This paper aims to analyze the political dynamics in education policy in Indonesia, as well as its impact on the continuity and quality of the national education system. This research uses a library research method with a qualitative descriptive approach, focusing on a review of various scientific literature, policy documents, and related academic sources. The results of the study indicate that education policy often changes according to the ruling political regime, marked by changes in curriculum, programs, and policy directions that are not always aligned with the long-term needs of the education sector. The politicization of education has created uncertainty, weak strategic planning, and reduced independence of educational institutions. Therefore, a strong regulatory framework is needed based on scientific studies, community participation, and principles of sustainability that are free from practical political interests.

Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan, Kepentingan, Politik



PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek paling fundamental dan esensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pengelolaan pendidikan, setiap pihak perlu memiliki perspektif dan kesadaran yang mendalam terhadap urgensinya (Hilmy Nurfaizan Abdul Matin et al., 2025). Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar didunia memiliki tantangan besar dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata. Pendidikan yang berkualitas dan merata merupakan investasi yang akan berimplikasi terhadap kualitas sumber daya manusia (Sanga & Wangdra, 2023 dalam Fakhruddin, 2025).

Selain itu, pendidikan juga dianggap mampu menjadi pendorong majunya ekonomi dan sosial suatu negara (Mohanraj & Shona, 2022). Kebijakan politik pendidikan merupakan faktor kunci dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pendidikan nasional memiliki tanggung jawab menciptakan kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam ayat empat. Ciri-ciri atau karakter tersebut harus terintegrasi dalam rancangan besar, peta jalan, kebijakan, serta program-program pendidikan nasional (Diswantika et al., 2022).

Politik pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam menentukan kebijakan-kebijakan strategis di bidang Pendidikan (Asdrayany et al., 2023). Kebijakan pendidikan di Indonesia meliputi berbagai bidang, termasuk pendanaan, pengembangan kurikulum, pemerataan akses pendidikan, serta peningkatan mutu pengajaran. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan untuk mendorong perbaikan kualitas pendidikan, seperti penerapan program pendidikan inklusif, reformasi kurikulum, dan peningkatan pelatihan bagi tenaga pendidik (Sugiyarti et al., 2025).

Azra mengungkapkan bahwa, ketika membahas isu pendidikan, kenyataan yang muncul ialah sistem pendidikan selalu terkait erat dengan kebijakan politik (Azra, 1999 dalam Asrori, 2015). Hal ini berimplikasi pada proses pelaksanaan pendidikan, kebijakan pendidikan sering kali mengalami ketidak konsistenan. Pergantian arah kebijakan, perubahan kurikulum yang berulang, serta program-program sementara yang kurang berkelanjutan mencerminkan ketidakstabilan dalam sistem pendidikan nasional.

Terlihat dari setiap kali terjadi pergantian pemerintahan, kabinet yang menjabat pun turut berubah. Pergantian kabinet ini secara otomatis diikuti dengan munculnya kebijakan-kebijakan baru, termasuk dalam bidang pendidikan (Suwarno, 2016). Indonesia sendiri telah beberapa kali mengganti kurikulum, mulai dari Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (2004), KTSP 2006, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka. Kebijakan yang sering berubah cenderung lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada didasarkan pada kajian ilmiah jangka panjang. Hal ini mencerminkan lemahnya perencanaan strategis dalam sektor Pendidikan (Aulia et al., 2025). Perubahan kurikulum

sering kali memunculkan respons skeptis, seperti ungkapan “ganti Mentri ganti kurikulum.” Pernyataan ini diperkuat oleh pendapat (Edi, 2018) yang menyatakan bahwa sistem pendidikan yang berada di bawah kendali pemerintah suatu negara selalu berlandaskan pada visi ideologis tertentu.

Ketidakkonsistenan arah kebijakan pendidikan di Indonesia memberikan gambaran adanya dinamika yang kompleks antara tujuan ideal pendidikan dan kepentingan politik yang menyertainya. Setiap pergantian rezim atau pejabat tinggi, seringkali diikuti oleh perubahan kurikulum, program, maupun orientasi kebijakan yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan jangka panjang dunia pendidikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya berlandaskan pada kajian akademis yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan peserta didik, melainkan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana intervensi politik dalam kebijakan pendidikan berkontribusi terhadap ketidakkonsistenan arah pendidikan nasional, sekaligus memahami dampaknya terhadap kualitas dan keberlanjutan sistem pendidikan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui penelaahan terhadap literatur yang ada dan analisis terhadap topik-topik yang relevan serta saling berkaitan. Penelusuran sumber pustaka dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai referensi seperti jurnal, buku, kamus, dokumen, majalah, dan sumber-sumber lainnya, tanpa perlu melakukan penelitian langsung di lapangan (Fatha Pringgar & Sujatmiko, 2020). Data yang telah dikumpulkan kemudian dipelajari, dipahami, dianalisis, dan dicatat menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan metode yang menyajikan gambaran atau penjelasan berdasarkan pernyataan-pernyataan yang diambil dari sumber-sumber referensi terkait topik yang diteliti (Azizah et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kebijakan Pendidikan Di Indonesia

Dalam perkembangan pendidikan di Indonesia, salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diharapkan adalah melalui perubahan kebijakan kurikulum (Setiawati, 2022). Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah mengalami transisi dari kurikulum 1994 ke kurikulum berbasis kompetensi (KBK), lalu ke kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), kemudian ke kurikulum 2013, dan yang terbaru adalah kurikulum merdeka (Herman et al., 2023). Situasi ini menimbulkan kegelisahan akademik dari kalangan pendidik dan pemangku kepentingan pendidikan. Transformasi kurikulum ini menimbulkan berbagai pertanyaan kritis serta kekhawatiran

mengenai efektivitas implementasinya dan potensi dampaknya terhadap capaian pembelajaran (Wulandari, 2022)

Pembangunan pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah persoalan kebijakan yang berkaitan dengan tiga aspek utama dalam sistem pendidikan. Pertama, proses perumusan kebijakan pendidikan masih didominasi oleh kalangan elit politik dengan pendekatan top-down, sementara keterlibatan masyarakat masih sangat terbatas. Di sisi lain, meskipun era otonomi daerah telah dimulai, praktik birokrasi dengan pola lama masih sering terjadi. Kedua, banyak kebijakan pendidikan yang dirancang dengan kompleksitas tinggi dan biaya besar, namun pada saat pelaksanaannya justru mengalami penyimpangan serta tidak berjalan sesuai rencana. Ketiga, berbagai kebijakan inovatif dalam dunia pendidikan sering kali dilaksanakan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan dampak dan konsekuensinya secara menyeluruh (Komara, 2016). Perkembangan kebijakan pendidikan di Indonesia dapat ditelusuri melalui tiga fase utama yang merefleksikan pergeseran dalam politik dan ideologi Pendidikan yakni:

Masa Orde Lama

Pasca kemerdekaan, Indonesia mulai menata sistem pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pada masa Orde Lama, kebijakan pendidikan diarahkan untuk menghapus sistem kolonial dan menanamkan nilai patriotisme, sebagaimana tercermin dalam instruksi umum Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri pendidikan pertama (Mukodi, 2016). Pada masa Orde Lama, komitmen terhadap pemerataan pendidikan diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954, keberlakuan UU tersebut diperluas secara formal ke seluruh wilayah Indonesia, menegaskan upaya pemerintah dalam membangun sistem pendidikan yang merata dan terpadu (Hartono, 2016).

Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia merancang dan menerapkan berbagai kebijakan pendidikan yang diarahkan untuk menunjang pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pada masa Orde Baru (1966–1998), pemerintah menetapkan berbagai kebijakan pendidikan yang sejalan dengan visi dan ideologi rezim. Salah satu kebijakan utama adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan peran pendidikan dalam membentuk karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme (Ratnaningrum, 2022).

Pemerintah Orde Baru juga meluncurkan program Wajib Belajar 9 Tahun, yang mencakup 6 tahun pendidikan dasar dan 3 tahun pendidikan menengah pertama. Program ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah serta mendorong

penyelesaian pendidikan dasar bagi seluruh anak Indonesia (Rondong, 2019 dalam Muhajirin et al., 2024). Masa Orde Baru menandai dimulainya era pembangunan nasional yang bertujuan membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta pelaksanaan UUD 1945 secara konsisten. Arah pembangunan ini ditegaskan dalam TAP MPRS No. LI/MPRS/1968 tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan. Sementara itu, kebijakan pembangunan di bidang pendidikan merujuk pada TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, yang menjadi dasar bagi pengembangan sistem pendidikan nasional dalam kerangka ideologi negara (Tilaar, 1995 dalam Mukodi, 2016).

Masa Reformasi

Era Reformasi memberikan ruang yang lebih besar bagi perumusan kebijakan pendidikan yang bersifat reformis dan revolusioner. Salah satu perubahan signifikan adalah peralihan ke kurikulum berbasis kompetensi, serta pergeseran pelaksanaan pendidikan dari sistem sentralistik pada masa Orde Lama menuju desentralisasi. Pada awal era Reformasi 1999, sistem pendidikan Indonesia mengalami perubahan signifikan melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang mendesentralisasikan sektor pendidikan. Pemerintah memperkenalkan model Manajemen Berbasis Sekolah dan mengembangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia berkualitas. Selanjutnya, UU No. 20 Tahun 2003 menggantikan UU No. 2 Tahun 1989, menegaskan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendorong pengembangan potensi siswa secara aktif, meliputi aspek spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, moral, serta keterampilan yang bermanfaat bagi individu, masyarakat, bangsa, dan negara (Khaeruddin, 2022 dalam Bakhrudin Al Habsy et al., 2024)

Masih pada era yang sama diperkenalkan kurikulum baru lagi yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kelanjutan dari pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang dimulai sejak tahun 2004. Kurikulum ini dirancang untuk mengintegrasikan tiga aspek kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada penjelasan Pasal 35, yang menyatakan bahwa kompetensi lulusan mencakup kemampuan dalam tiga aspek tersebut sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan. Penyampaian ini menjadi bagian dari proses uji publik terhadap Kurikulum 2013, yang bertujuan untuk menghimpun berbagai pandangan dan masukan dari Masyarakat (Muhammedi, 2016).

Kemudian setelah kurikulum 2013 dilakukan perubahan ke kurikulum baru yang dikenal dengan kurikulum Merdeka, perubahan kurikulum ini bersamaan dengan perubahan rezim yang berkuasa. Kurikulum Merdeka hadir sebagai bentuk upaya dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi era Society 5.0. Era ini merupakan

fase baru yang menekankan pada pendekatan yang berpusat pada manusia dengan dukungan teknologi canggih. Dalam menghadapi era ini, keseimbangan antara peran manusia dan pemanfaatan teknologi menjadi hal yang sangat penting (Riskiyah et al., 2024)

Dinamika perubahan kurikulum memiliki dampak yang bersifat dualistik terhadap mutu pendidikan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dari sisi positif, perubahan kurikulum dapat membuka ruang bagi peserta didik untuk terus belajar secara relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Meski membawa peluang positif, perubahan kurikulum juga berisiko menurunkan mutu pendidikan. Perubahan yang terlalu cepat dapat menyulitkan siswa beradaptasi, sehingga berdampak pada penurunan prestasi belajar (Setiawati, 2022). Ketidakstabilan kebijakan pendidikan tidak hanya berimplikasi pada perubahan kurikulum, namun kebijakan-kebijakan besar lainnya seperti bantuan operasional sekolah (BOS), full day school serta penghapusan ujian nasional juga kerap kali tidak memiliki keberlanjutan yang jelas (Tintington et al., 2023). Banyak di antaranya lebih mencerminkan visi menteri atau presiden yang sedang menjabat, bukan konsensus nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Para guru, dan siswa sebagai aktor utama dalam dunia pendidikan kerap kali menjadi korban dari kebijakan yang berubah-ubah. Salah satu dampak dari dinamika kebijakan pendidikan yang tidak konsisten ialah menurunnya motivasi belajar siswa. Ketika peserta didik merasa bahwa kurikulum yang baru lebih menarik dan memiliki keterkaitan dengan kehidupan mereka, hal tersebut dapat meningkatkan minat serta partisipasi mereka dalam proses pembelajaran. Sebaliknya, jika mereka mengalami kesulitan dalam memahami materi baru atau tidak melihat relevansi antara pelajaran dan realitas sehari-hari, maka motivasi belajar cenderung menurun (Tengku Darmansah et al., 2024).

Selain para siswa, guru juga sering kali menjadi korban dari kebijakan yang tidak matang, seperti pelatihan yang mendadak atau sistem penilaian yang berubah-ubah. Hal tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan kinerja guru dalam mendidik. Studi yang dilakukan oleh Grenville-Cleave dan Boniwell pada tahun 2012 menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan psikologis para pendidik secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang bekerja di bidang pekerjaan sosial, pengembangan sumber daya manusia, dan sektor kesehatan. Hal ini menimbulkan keprihatinan serius terhadap kondisi psikologis para guru, terutama di wilayah terpencil, di mana ketimpangan kesejahteraan tampak lebih nyata (Syahida & Daliman, 2023).

Kepentingan Politik Dalam Kebijakan Pendidikan

Di negara-negara Barat, kajian mengenai keterkaitan antara pendidikan dan politik telah dimulai sejak zaman Plato melalui karyanya yang berjudul *Republik*. Dalam buku

tersebut, Plato menunjukkan bahwa dalam budaya Helenistik, institusi pendidikan merupakan bagian integral dari sistem politik. Ia mengemukakan bahwa setiap kebudayaan cenderung mempertahankan kendali atas pendidikan di tangan kelompok elite, yang juga menguasai kekuasaan di bidang politik, ekonomi, agama, dan pendidikan. Melalui karyanya, Plato mengilustrasikan adanya hubungan yang saling memengaruhi antara aktivitas pendidikan dan proses politik (Leo Agustino, 2007 dalam Jumani, 2015).

Sejarah Pendidikan di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran makna dari konsep pendidikan yang awalnya diwariskan oleh para pendiri bangsa. Saat ini, pendidikan mulai kehilangan pijakan filosofisnya dan tampak tidak memiliki arah atau orientasi yang jelas. Di Indonesia, pendidikan cenderung semakin bersifat pragmatis. Akar dari pragmatisme ini sudah terlihat sejak masa kolonial dan semakin menguat pada era reformasi (Wilujeng et al., 2020). Pendidikan kerap kali dimanfaatkan sebagai sarana dan wadah untuk menanamkan ideologi negara atau sebagai fondasi yang mendukung struktur politik (Widias Tuti & Ismira, 2024).

Saat ini pendidikan nasional cenderung didominasi oleh kekuatan politik praktis, yang menunjukkan bahwa partai politik telah menjadikan sektor pendidikan sebagai bagian dari arena perebutan kekuasaan. Akibatnya, orientasi pendidikan bergeser dari tujuan idealnya yakni membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Namun faktanya Pendidikan menjadi alat untuk memperkuat posisi politik kelompok tertentu yang bersifat pragmatis (Suhariadi et al., 2023).

Dalam ranah pendidikan formal, buku pelajaran sering digunakan sebagai alat strategis utama untuk mentransmisikan pengetahuan sekaligus nilai-nilai ideologis kepada siswa. Fungsinya tidak hanya terbatas pada pengajaran teori, tetapi juga menyelipkan ideologi yang dominan di Masyarakat (Khanifah & Mudzakkir, 2024). Secara tidak langsung, buku pelajaran membentuk cara pandang siswa terhadap realitas sosial. Hal ini terjadi karena siswa, sebagai bagian dari generasi muda yang berada dalam sistem pendidikan, berada dalam posisi yang rentan terhadap dominasi pengetahuan dari kelompok sosial tertentu.

Louis Althusser juga mengemukakan bahwa pendidikan merupakan salah satu elemen dari Aparatus Ideologis Negara (*Ideological State Apparatus/ISA*), yang digunakan oleh kelas penguasa untuk mempertahankan dan mereproduksi ideologi yang dominan. Ideologi ini seringkali tidak disampaikan secara langsung, melainkan disisipkan secara halus melalui *hidden curriculum* yaitu kurikulum tersembunyi yang tidak secara eksplisit diajarkan, namun tertanam dalam diri siswa melalui proses interaksi mereka dengan sistem pendidikan, guru, serta materi pembelajaran (Althusser, 2007 dalam Khanifah & Mudzakkir, 2024)

Dalam beberapa kasus, kebijakan pendidikan bahkan dijadikan alat kampanye atau pencitraan oleh elite politik. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa pendidikan tidak hanya berperan dalam mengembangkan potensi individu dalam masyarakat, tetapi juga

berkontribusi langsung terhadap kualitas kehidupan suatu negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap kebijakan pendidikan mencerminkan keputusan-keputusan politik, tradisi, nilai-nilai, serta visi masa depan yang dianut oleh suatu negara (Yasin & Nurhasanah, 2021)

Pengaruh kepentingan politik dalam dunia pendidikan memiliki dampak yang signifikan. Ketika pendidikan dipolitisasi, hal ini dapat mengakibatkan terbatasnya kebebasan akademik, penyampaian pengetahuan yang tidak netral, serta terbentuknya pandangan yang sempit. Selain itu, hal ini juga dapat memperdalam polarisasi dalam masyarakat. Politisasi pendidikan berpotensi menghambat kemampuan berpikir kritis, menimbulkan sikap intoleran, dan melemahkan apresiasi terhadap keberagaman (Fernando & Sirozi, 2024). Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelenggarakan pendidikan secara objektif dan bebas dari pengaruh kepentingan politik tertentu.

Kebijakan Pendidikan Yang Berkelanjutan

Pendidikan yang berkelanjutan menjadi landasan utama dalam menciptakan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan dinamika global. Di Indonesia, berbagai langkah pembaruan sistem pendidikan terus digalakkan melalui kebijakan nasional yang berfokus pada peningkatan akses, kualitas, relevansi, serta pengelolaan pendidikan yang lebih baik. Penggunaan data yang akurat dan berbasis riset perlu dijadikan dasar utama dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi program-program Pendidikan (Islami & Rozak, 2025). Bukan semata-mata atas dasar visi politik jangka pendek.

Proses perumusan kebijakan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga melibatkan berbagai pihak, seperti kalangan akademisi, praktisi pendidikan, serta masyarakat sipil. Dalam hal ini, analisis kebijakan pendidikan memegang peranan penting untuk menilai dampak dari kebijakan yang diberlakukan serta mengevaluasi hasil implementasinya di lapangan (Sugiyarti et al., 2025). Analisis kebijakan pendidikan mencakup proses pengumpulan serta pengolahan data guna menilai sejauh mana kebijakan yang ada berjalan efektif, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini dapat berupa metode kuantitatif, seperti penggunaan data statistik pendidikan, maupun pendekatan kualitatif, seperti studi kasus dan wawancara mendalam. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin bahwa kebijakan yang diberlakukan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan, tetapi juga bersifat inklusif dan berkelanjutan (Komara, 2016).

Dalam proses merumuskan kebijakan pendidikan yang tidak dapat dilepaskan dari unsur politik, diperlukan kemampuan untuk mengesampingkan ego pribadi maupun kelompok agar perbedaan yang muncul dapat ditangani secara netral dan objektif. Sehingga akan mewujudkan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran dan berkelanjutan (Wijaya, Candra., 2016). Pelaksanaan kebijakan pendidikan berkelanjutan di Indonesia

masih dihadapkan pada sejumlah hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya integrasi prinsip keberlanjutan dalam kurikulum, serta minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan pendidikan berkelanjutan secara efektif, diperlukan langkah-langkah yang lebih terarah, antara lain dengan memperkuat dukungan infrastruktur dan sumber daya pendidikan, mengintegrasikan konsep keberlanjutan ke dalam kurikulum secara sistematis, meningkatkan kesadaran publik serta partisipasi masyarakat, mempererat kerja sama lintas sektor antara pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat, serta memanfaatkan teknologi guna memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan yang berkelanjutan (Maulana et al., 2024).

Penting untuk menyadari bahwa pendidikan bukanlah sekadar ladang eksperimen kebijakan yang dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan kepentingan atau agenda politik sesaat. Pendidikan merupakan fondasi utama bagi pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa, sehingga memerlukan pendekatan yang penuh kehati-hatian, kesinambungan, dan konsistensi dalam perumusan serta pelaksanaannya. Kebijakan pendidikan harus didasarkan pada kepentingan jangka panjang masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan politik dalam waktu singkat. agar generasi mendatang dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang secara optimal dan berkontribusi secara positif bagi kemajuan bangsa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pergantian kebijakan pendidikan yang kerap berubah-ubah, terutama kurikulum, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan yang berdampak negatif pada kualitas dan keberlanjutan pendidikan nasional. Kebijakan yang lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek daripada kajian ilmiah dan kebutuhan riil peserta didik telah menimbulkan tantangan serius dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdasarkan riset yang mendalam, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendidikan sebagai fondasi pembangunan bangsa harus diimplementasikan dengan pendekatan yang konsisten dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang, agar menghasilkan generasi penerus yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global. Bila perlu Pemerintah membentuk lembaga independen yang bertugas merumuskan arah kebijakan pendidikan jangka panjang agar tidak terpengaruh oleh pergantian rezim pemerintah.

REFERENSI

- Asdrany, D., Najmi Muhajir, M., Fauzi, A., & Qurtubi, A. (2023). Analisis Konsep, Teori dan Lingkup Politik Pendidikan. *Journal on Education*, 06(01), 6840–6852.
- Asrori, M. (2015). Politik Dan Pendidikan (Tinjauan Historis Pengaruh Kebijakan Politik Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia). *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*,

2(1), 53–67.

- Aulia, K. N., Muhtadi, D. A., Aditya, N. P., Santosa, J. N., & Hanggono, V. F. (2025). Permasalahan Pendidikan Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(1), 1–15.
- Azizah, H. D., Alam, B. H., & Nursyaban, A. (2024). Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Sejarah Pendidikan di Indonesia Dari Masa Prasejarah Hingga Awal Kemerdekaan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 218–224.
- Bakhrudin All Habsy, Alifia Puteri Nugroho, Syakira Zahira Shofa, & Sherlyna Yuniar Nonitasari. (2024). Sistem Pendidikan di Indonesia pada Masa ke Masa. *Jurnal Bima : Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 2(4), 240–256.
- Diswantika, N., Istirahayu, I., & Taufiq, A. (2022). Politik Pendidikan Di Indonesia Dan Isu Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia*, 8(2), 121.
- Edi, S. (2018). Ideologi, Kekuasaan, Dan Pengaruhnya Pada Arah Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (1950-1965). *Journal of Indonesian History*, 7(1), 19–34.
- Fatha Pringgar, R., & Sujatmiko, B. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Pembelajaran Siswa. *Jurnal IT-EDU*, 05(01), 317–329.
- Fernando, D. A., & Sirozi, M. (2024). Pengertian “Politik Pendidikan” dan Perbedaannya dengan “Pendidikan Politik” dan “Politisasi Pendidikan.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12), 10994–11000.
- Hartono, Y. (2016). Pendidikan Dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi). *Jurnal Agastya*, 6(1), 37.
- Herman, H., Lukman Panji, A., & Eka Mahmud, M. (2023). Kebijakan Perubahan Kurikulum Di Indonesia. *An-Nadzir : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(02), 92–104.
- Hilmy Nurfaizan Abdul Matin, Cecep Darmawan, Prayoga Bestari, & Syaifullah. (2025). Civic Governance and Good Governance : Dinamika Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah. *Integralistik*, 36(1).
- Islami, H., & Rozak, A. (2025). Analisis Kebijakan Pendidikan Berkelanjutan : Studi Evaluasi atas Tujuh Arah Strategis Pemerintah dalam RPJMN 2020 – 2024. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 736–745.
- Jumani. (2015). Implementasi Politik Pendidikan Dalam Kurikulum 2013. *Dewantara*, 1(2), 180–195.
- Khanifah, A., & Mudzakkir, M. (2024). Hidden Curriculum Buku Pelajaran Sosiologi: Transfer Ideologi Antar Generasi. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(6), 1887–1906.
- Komara, E. (2016). *Pengambilan Keputusan Dan Analisis Kebijakan Sektor Pendidikan*.
- Maulana, I., Inayah, I. N., Suryaningsih, A., Gufron, A. al, & Taufiqurrohman, O. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan Berkelanjutan Melalui Kurikulum. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 7(5), 1458.
- Mohanraj, M., & Shona, S. (2022). National Education Policy 2020 and Higher Education: A Brief Review. *International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)*, 4(1), 814–817.
- Muhajirin, Su’adi, & Minnah El Widdah. (2024). Kebijakan Pendidikan di Masa Orde Baru. *Journal Of Social Science Research*, 4, 3853–3864. <https://www.kompas.id>
- Muhammedi. (2016). Perubahan kurikulum di indonesia : studi kritis tentang upaya menemukan kurikulum pendidikan islam yang ideal. *Raudhah*, IV(1), 49–70.
- Mukodi. (2016). Refleksi Dinamika Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Profesi Pendidik*, 3(2), 141–152.

- Nasrudin, E., & Fakhrudin, A. (n.d.). *Implementasi Pendidikan Karakter Religius untuk Menumbuhkan Literasi Moral Siswa SD melalui Program Kampus Mengajar*. 8(2), 215–230.
- Ratnaningrum, W. A. (2022). Dasar-Dasar Yuridis Sistem Pendidikan Nasional. *Educational Technology Journal*, 2(2), 22–28.
- Riskiyah, E. M., Fariyanti, A., & Abidin, Z. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Membangun Generasi Unggul Dan Islami Menuju Era Society 5.0. *An-Nadzir : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(01), 1–13.
- Setiawati, F. (2022). Dampak Kebijakan Perubahan Kurikulum terhadap Pembelajaran di Sekolah The Impact of Curriculum Change Policy on Learning Activities at School. *Nizamul Ilmi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 1–12.
- Sugiyarti, N., Indriyani, L., & Duryat Masduki. (2025). Pengertian politik, kebijakan dan pendidikan serta ruang lingkup kebijakan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic*, 11(11), 2685–2063.
- Suhariadi, F., Sugiyarti, R., Hardaningtyas, D., Mulyati, R., Kurniasari, E., Saadah, N., Yumni, H., & Abbas, A. (2023). Work from home: A behavioral model of Indonesian education workers' productivity during Covid-19. *Heliyon*, 9(3), e14082.
- Suwarno. (2016). Pendekatan Kebijakan Publik dalam Politik Pendidikan Islam. *Jurnal As-Salam*, 1(1), 62–72.
- Syahida, A. A., & Daliman, D. (2023). Kesejahteraan Psikologis pada Guru PAUD laki-laki (Sebuah Pemaknaan diri sebagai Figur Ayah). *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(5), 6327–6342.
- Tengku Darmansah, Anggi Anggraini, Fauzan Azhima Sirait, Nurkhotima Nurkhotima, & Wardah Sahrani Sibarani. (2024). Peran Kebijakan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Bagi Peserta Didik. *Jurnal Arjuna : Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Matematika*, 3(1), 94–102.
- Tintingon, J. Y., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 798–809.
- Widias Tuti, & Ismira. (2024). Analisis Kritis Politis Pendidikan di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 6272–6280.
- Wijaya, Candra., E. al. (2016). *MEMBANGUN PENDIDIKAN BERKUALITAS: Analisis dan Inovasi Kebijakan*.
- Wilujeng, S. R., Syamsuddin, M. M., & Murtiningsih, R. S. (2020). Dinamika Pendidikan Di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat. *Humanika*, 27(2), 170–183.
- Wulandari, T. R. (2022). Analisis Frekuensi Perubahan Kurikulum terhadap Konsistensi Pendidikan. *JOIES: Journal of Islamic Education Studies*, 7(2), 220.
- Yasin, I., & Nurhasanah, E. (2021). Isu-Isu Pendidikan dalam Kampanye Pilkada Kabupaten Dompu 2015. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 2(1), 38–48.